



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
UNIT KERJA : DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SILAS RUMANTI SABARATI**
2. Jabatan : **SEKRETARIS**
3. NHK : **880588**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. **2.276.080.000**

1. Tanah Seluas 234 m2 di KAB / KOTA KULON PROGO, WARISAN
Rp. 169.640.000
2. Tanah Seluas 1845 m2 di KAB / KOTA KULON PROGO, WARISAN
Rp. 1.191.440.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 130 m2/36 m2 di KAB / KOTA
PURBALINGGA, HASIL SENDIRI Rp. 185.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 102 m2/106 m2 di KAB / KOTA
PURBALINGGA, HASIL SENDIRI Rp. 290.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 266 m2/76 m2 di KAB / KOTA
PURBALINGGA, HASIL SENDIRI Rp. 185.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 102 m2/60 m2 di KAB / KOTA
PURBALINGGA, HASIL SENDIRI Rp. 255.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. **163.000.000**

1. MOBIL, MITSUBISHI XPANDER Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.
150.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.
4.000.000
3. MOTOR, HONDA CB Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. **97.200.000**

D. SURAT BERHARGA

Rp. **----**

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. **848.355.079**

F. HARTA LAINNYA

Rp. **----**



Sub Total	Rp.	3.384.635.079
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.384.635.079

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.